

MANAJEMEN KOMUNIKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH DALAM MENGELUARKAN KEBIJAKAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Novita Srildayanti^{1*}, Harmonis², Nani Nurani Muksin³, Aminah Swarnawati⁴

^{1,2,3,4}Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

⁵Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

*Korespondensi: novitasarildayanti@gmail.com

Citation (APA):

Srildayanti, N., Harmonis, Muksin, N. N., & Swarnawati, A. (2023). Manajemen Komunikasi Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam Mengeluarkan Kebijakan di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 52–64. <https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.2865>

Email Authors:

novitasarildayanti@gmail.com,
harmonis@umj.ac.id,
naninuranimuksin@umj.ac.id,
aminah.swarnawati@umj.ac.id

Submitted: 29 Oktober 2023

Accepted: 03 November 2023

Published: 09 Desember 2023

Copyright © 2023 Novita Srildayanti, Harmonis, Nani Nurani Muksin, & Aminah Swarnawati

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Studi ini membahas tentang, Manajemen Komunikasi Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam Mengeluarkan Kebijakan di Tengah Pandemi Covid-19. DPP IMM adalah salah satu organisasi kemahasiswaan yang mengalami dampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu, manajemen komunikasi yang efektif diperlukan untuk mengatasi masalah yang muncul dalam organisasi, baik di pusat maupun daerah. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan. Informan yang terlibat dalam penelitian memahami subjek penelitian melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPP IMM melakukan penelitian tentang perencanaan kebijakan yang dapat diterapkan selama pandemi COVID-19. Kegiatan ini awalnya dilakukan secara tatap muka, tetapi sekarang dilakukan secara digital atau online. Kemudian, kebijakan tersebut juga mempercepat waktu pelaksanaan kegiatan, yang sebelumnya memakan waktu tiga hingga lima hari, menjadi hanya tiga hari dengan pengawasan instruktur yang ketat. Dengan demikian, organisasi harus menggunakan media digital saat mengembangkan organisasi pemuda dan kemahasiswaan di era modern saat ini. Selain itu, para pemimpin organisasi membutuhkan bimbingan yang akurat dan konsisten untuk melaksanakan kebijakan organisasi. Oleh karena itu, DPP IMM memberikan instruksi melalui pengoptimalan komunikasi online seperti Zoom Meeting, Group Whatsapp, dan komunikasi pribadi yang intensif, terutama untuk membangun kebijakan untuk membangun pergerakan organisasi dan menemukan solusi baru untuk memastikan aktivitas organisasi tetap berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Manajemen Komunikasi, DPP IMM, Kebijakan, Pandemi Covid-19

ABSTRAK

This study discusses the Communication Management of the Central Leadership Council of the Muhammadiyah Student Association in issuing Policies amid the Covid-19 Pandemic. DPP IMM is one of the student organizations experiencing the impact of the COVID-19 pandemic. Therefore, effective communication management is needed to overcome the problems that arise in the organization, both at the central and regional levels. Qualitative descriptive research was used. Informants involved in the research understood the research subject through documentation, interviews, and observations. The results showed that DPP IMM conducted research on policy planning that could be implemented during the COVID-19 pandemic. These activities were initially done face-to-face, but are now done digitally or online. Then, the policy also accelerates the implementation time of the activities, which previously took three to five days, to only three days with strict instructor supervision. Thus, organizations must use digital media when developing youth and student organizations in today's modern era. In addition, organizational leaders need accurate and consistent guidance to implement organizational policies. Therefore, the DPP IMM provides instructions through optimizing online communication such as Zoo.

Keywords: Communication Management, DPP IMM, Policy, Covid-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Karena pandemi COVID-19, program-program keorganisasian biasanya dilaksanakan di ruangan dan tempat tertutup telah digantikan melalui pembelajaran daring (dalam jaringan) atau melalui online.

Selain itu, kegiatan di luar teknis yang sebelumnya dilaksanakan di tempat pekerjaan telah berubah menjadi kegiatan melakukan pekerjaan melalui rumah. Karena itu, perjumpaan menggunakan aplikasi seperti Zoommeeting, Aplikasi WhatsApp, hingga GoogleMeet telah digantikan dengan pertemuan menggunakan aplikasi ini pada berbagai pertemuan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Amalia, 2020), bahwa Pandemi Covid-19, merupakan sebuah virus dan penyakit yang muncul dan belum teridentifikasi, muncul pada akhir 2019 dan menyerang manusia. Penyakit ini memiliki masa inkubasi sekitar lima hingga enamhari, dan yang terpanjang adalah empat belas hari. Tanda dan gejala yang umum dari gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Gangguan ini dapat menyebabkan sindrom pernapasan akut, pneumonia, gagal ginjal, dan sampai kematian.

Salah satu organisasi kemahasiswaan terbesar dan teraktif di Indonesia, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) pasti bergantung pada komunikasi. IMM adalah organisasi yang besar dan memiliki struktur berjenjang yang ada di banyak perguruan tinggi di Indonesia. Struktur tersebut terdiri dari Pusat yaitu Dewan Pimpinan Pusat (DPP), kemudian daerah yaitu Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan cabang Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan Pimpinan Komisariat. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) bertanggung jawab atas IMM secara organisasi. DPP IMM berfungsi sebagai pimpinan utama yang membuat peraturan dan aturan yang dapat digunakan dan diimplementasikan oleh IMM di seluruh tingkatan baik itu daerah, cabang hingga sub struktur terkecil. Pada tahun 2018, IMM memiliki 812 Pimpinan Komisariat (PK), 317 Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan 33 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di seluruh wilayah Indonesia (Dokumen DPP IMM, 2021). Semua organisasi harus jelas menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia teknologi saat ini. Seperti yang telah diketahui terlebih dahulu, cara konvensional menjadi salah satu strategi dalam menjalankan roda organisasi.

Pada mulanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 yang telah lewat, IMM merasakan beberapa permasalahan seperti kesulitan secara keorganisasian, terutama berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan di dalam organisasi. Sebelum pandemi, semua operasi IMM dilakukan secara tatap muka atau secara langsung. Namun, setelah pandemi, banyak aktivitas perkaderan IMM tidak dapat dilakukan dan ditunda dari jadwal yang sudah disepakati sebelumnya akibat covid-19. Jika masalah muncul, manajemen komunikasi yang tepat sangat penting untuk mengatasi krisis dan mengatur ulang kebijakan-kebijakan penting dalam internal organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anggota organisasi terus melakukan interaksi dan berkomunikasi dengan baik dan terarah. Pada akhirnya, sebagai pimpinan paling tinggi DPP, IMM menetapkan tata aturan dan tata kelola, yang selanjutnya diselaraskan dengan pandemi dengan menggunakan metode komunikasi online. Komunikasi adalah proses yang terus berubah di mana seseorang atau beberapa individu, kelompok, organisasi, komunitas, dan masyarakat menggunakan informasi untuk terhubung atau terhubung dengan lingkungan dan orang lain dengan awal di mana kegiatan dimulai dan akhir di mana kegiatan menuju tujuan yang diinginkan. Atau secara sederhana proses menuju tercapainya apa yang dimaksud dan dituju (Cangara, 2013:36). Lebih lanjut, Semua tindakan berhubungan satu sama lain disebut sebagai manajemen komunikasi (Gunawan, 2020:6). Kegiatan tersebut tidak hanya sebatas mengelola karyawan organisasi atau struktural dalam organisasi, tetapi juga bagaimana mengelola perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian.

Seseorang yang bekerja di suatu jabatan dianggap sebagai unit komunikasi organisasi yang utama (Priyono, 2018). DPP IMM membahas dan memberikan interpretasi deregulasi yang berkaitan

dengan kebijakan dan aturan yang diputuskan oleh DPP IMM untuk mengatasi permasalahan Covid-19. Ini termasuk aturan tentang rekrutmen, perkaderan, musyawarah, penelitian keilmuan, dan bakti sosial yang biasa dilakukan oleh IMM secara keorganisasian. Salah satu bagian dari upaya untuk melaksanakan manajemen komunikasi adalah deregulasi yang dilakukan oleh DPP IMM. Untuk membantu anggota organisasi menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan situasi yang terjadi, manajemen komunikasi dapat digunakan serta difungsikan sebagai sarana informasi yang membantu mereka mengembangkan cara berkomunikasi dan berinteraksi secara profesional dan proporsional. Tujuan dari manajemen komunikasi adalah untuk menghasilkan komunikasi yang efektif, efisien dan baik, sehingga setiap anggota organisasi dapat mengedepankan toleransi, bekerja sama, gotong royong, menghargai satu sama lain, dan menerima perspektif atau pandangan berbeda dari orang lain. Sebuah Organisasi akan memperoleh kelancaran komunikasi sangat bergantung pada bagaimana pimpinan organisasi dan anggota organisasi tersebut membangun cara berkomunikasi dengan efektif, efisien dan baik.

Manajemen komunikasi pasti menemukan berbagai masalah dan kendala di berbagai bidang. Oleh karena itu, beberapa masalah komunikasi memungkinkan akan mengganggu kegiatan organisasi mulai dari pola rekrutmen, keanggotaan hingga permasalahan lain. Faktor-faktor berikut akan dapat menyebabkan kekeliruan atau kesalahan informasi akibat komunikasi yang tidak sejalan (tidak efektif dan tidak efisien): kecenderungan sosial yang berbeda *social power*, persoalan penyampaian gramatikal lughawi atau bahasa, sulit menerima perbedaan pendapat, faktor geososial yang berbeda sehingga terjadi budaya yang berbeda serta lingkungan yang tidak sama membuat perbedaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sebagai pilihan pendekatan. (Creswell, 2016:3), Creswell selanjutnya memberi penjelasan bahwa rencana dan metodologi penelitian, yang mencakup asumsi-asumsi yang luas hingga teknik pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang khusus. Hal tersebut yang menjadi ciri khusus pendekatan kualitatif. Selain itu, penelitian ini memiliki 3 informan dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. (Sugiyono, 2019). Selanjutnya, data dianalisis dalam tiga tahap: pengurangan, penyebaran, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) didirikan di Yogyakarta pada 14 maret 1964 M, bertepatan dengan 29 Syawal 1384 H, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) adalah gerakan mahasiswa Islam yang berbasis pada Al-Qur'an dan As-Sunah. Djasman Al-kindi, Rosyad Sholeh, dan Soedibyo Markoes adalah tiga pemuda yang mendukungnya. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dipimpin oleh KH. Ahmad Badawi, meresmikan IMM (Profil IMM, 1964). IMM berasal dari sejarah Muhammadiyah dan dapat dianggap sejalan dengan pendirian Muhammadiyah. Ini menunjukkan bahwa setiap tindakan Muhammadiyah menunjukkan keinginan Muhammadiyah untuk memenuhi cita-citanya sesuai dengan kehendaknya sebagai gerakan pembaharuan. Selain itu, itu juga IMM dicitakan merupakan jawaban atas masalah keumatan yang bergulir dan menjadi konstelasi di negara ini pada awal kelahiran IMM, sehingga kehadiran IMM adalah keharusan sejarah. Kalangan Muhammadiyah sudah ada sejak lama. Pada Kongres Abad Muhammadiyah di Betawi, Jakarta, tahun 1936, semangat

untuk mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah sebenarnya telah meningkat. KH.Hasyim tahu bahwa Muhammadiyah memiliki pimpinan pusat pada saat itu (Periode 1934-1937).

Identifikasi Masalah

Perekrutan anggota organisasi seperti Darul Arqom Dasar (DAD), Darul Arqom Madya (DAM), dan Darul Arqom Paripurna (DAP) adalah salah satu contoh dari kegiatan rekrutmen yang terhambat dikarenakan aturan dan kebijakan yang dibuat selama pandemi COVID-19 berlangsung, yang tentunya membuat banyak aktivitas penting organisasi tidak dapat dijalankan dengan maksimal. Selain agenda perekrutan, musyawarah organisasi IMM yang wajib untuk pergantian kepemimpinan, Musyawarah Komisariat, Musyawarah Cabang, Musyawarah Daerah, dan MUKTAMAR juga tidak dapat dilakukan. Ini tidak mungkin pada awal pandemi COVID-19. Pada akhirnya, berdampak pada jumlah anggota, kaderisasi, dan pergantian kepemimpinan.

Selanjutnya, selama pandemi Covid-19, Dewan Pimpinan Pusat IMM menetapkan beberapa kebijakan organisasi. Kebijakan ini mencakup kegiatan keilmuan, perekrutan anggota, dan musyawarah untuk agenda regenerasi dan pergantian kepemimpinan, dengan tujuan menjadi solusi disaat situasi tidak memungkinkan. Fakta empiris memperlihatkan bahwa selama masa pandemi Covid-19, kebijakan yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP IMM) mengembalikan semua aktivitas organisasi ke tingkat normal. Selain itu, ada peningkatan jumlah Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah dan Komisariat. Di tengah pandemi, manajemen komunikasi DPP IMM terintegrasi dengan bagian organisasi yang berfungsi sebagai pengambil kebijakan, seperti Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum, serta Bidang Organisasi, Kader, Hikmah, dan Kebijakan Publik. Mereka juga mengambil kebijakan dan mensosialisasikan mereka melalui media resmi DPP IMM, dengan tujuan agar kebijakan dapat diketahui oleh sub-otonom IMM di daerah-daerah.

Perencanaan (*Planning*)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 29 September 2022, bersama A.S.T, sebagai Ketua Bidang Organisasi DPP IMM, yang kemudian menyatakan bahwa:

“IMM menghadapi kesulitan dan permasalahan dalam melaksanakan aktivitas keorganisasian seperti kaderisasi, rekrutmen, diskusi, dan lainnya pada awal pandemi COVID-19. Namun, setelah DPP IMM membaharui kebijakan organisasinya dan menyebarkannya secara terstruktur, IMM dapat menyesuaikan operasi organisasinya selama pandemi bahkan setelah keluarnya kebijakan yang menyesuaikan dengan situasi. Ini berdampak besar pada penambahan massa, terutama pimpinan cabang. Sampai awal tahun 2022, IMM memiliki 34 DPD (dewan pimpinan daerah), 337 PC (pimpinan cabang), dan 812 PK (pimpinan komisi). (Wawancara November 2022).

Kemudian, wawancara lebih lanjut penulis lakukan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP IMM), Dalam hal perencanaan, hal-hal seperti tujuan arah haluan organisasi, target organisasi, strategi-strategi, dan taktik organisasi selama pandemi serta perencanaan dalam menyusun kebijakan organisasi selama pandemi COVID-19 yang dilakukan untuk jalannya organisasi. Berikut paparan hasil wawancara yang disampaikan oleh A.M.Y, yang merupakan Ketua Umum DPP IMM, terkait tujuan dan sasaran organisasi:

“IMM adalah organisasi kemahasiswaan Islam yang berfokus pada gerakan pencerdasan dan pencerahan terutama untuk mahasiswa. IMM, sebagai organisasi otonom di bawah

naungan Muhammadiyah salah satu organisasi terbesar di Indonesia, pasti memiliki tujuan untuk mencapai tujuan Muhammadiyah dengan membantu membentuk akademisi Islam (muslim intelektual) yang berakhlak mulia. Dalam garis besarnya, tujuan Muhammadiyah adalah untuk mendirikan masyarakat Islam yang benar (utama). (Wawancara November, 2022).

Lebih lanjut, disampaikan oleh A.S.T sebagai Ketua Bidang Organisasi DPP IMM, terkait langkah-langkah pengembangan strategi dan kebijakan organisasi, bahwa membuat strategi dan kebijakan organisasi selama pandemi COVID-19 untuk mempertahankan operasi dan kegiatan organisasi tetap berjalan, menggunakan media online dan mengubah aturan kegiatan secara teknis. Hal ini disampaikan dalam proses wawancara sebagai berikut:

“Tidak diragukan lagi, hal yang paling diinginkan bersama adalah kemampuan organisasi untuk bertahan dalam situasi apa pun. Oleh karena itu, kebijakan dan pola organisasi harus diperbarui untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Kami sering melakukan pertemuan secara online selamamasa pandemi covid-19 dan bahkan hingga saat ini, yang jelas dimulai dari pandemi COVID-19. Proses perkaderan, rekrutmen dan permusyawaratan yang belum pernah terjadi sebelumnya adalah kebijakan yang paling penting selama pandemi tersebut.

Kembali dilanjutkan A.S.T, bahwa “Agenda wajib terhambat dan terjadi kendala karena pelaksanaannya tetap secara tatap muka. Kebijakan baru, seperti kemampuan untuk melakukan perekaderan secara online via daring atau dalam jaringan, musyawarah komisariat dengan peserta terbatas, dan penggunaan media Zoom, memungkinkan organisasi berangsur-angsur pulih dan bahkan dapat berkembang pesat selama pandemi dengan jangkauan lebih luas dan masif.”. (Wawancara November 2022).

Pada aspek *Planning* dalam menentukan tujuan dan sasaran utama organisasi agar berhasil, termasuk mengembangkan strategi, menetapkan kebijakan, merencanakan, dan petunjuk umum untuk menggiatkan jalannya organisasi (Roesanto, 2021). Dalam tahap ini, perencanaan merupakan kegiatan awal yang dilakukan DPP IMM sebelum seluruh aktivitas organisasi dijalankan, dengan cara menetapkan dengan langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan, agar tujuan dalam organisasi dapat tercapai dengan efisien. Dalam konteks ini, DPP IMM sebagai pimpinan yang paling tinggi dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang berfungsi sebagai sumber kebijakan dan sebagai sumber penentu gerakan dan tujuan dalam organisasi. Dimana tujuan dari aktivitas organisasi IMM itu sendiri adalah membentuk mahasiswa yang intelektual, pemimpin yang kritis, yang religius, dan beradab melalui kegiatan-kegiatan organisasi.

Pada masa pandemi covid-19, DPP IMM mengalami kendala-kendala besar terutama mengenai aktivitas-aktivitas pokok organisasi, yang tentunya menghambat IMM dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Aktivitas-aktivitas pokok tersebut diantaranya, tidak bisa melakukan perekrutan anggota, melaksanakan tingkatan perkaderan seperti melaksanakan Darul Arqom Dasar, Darul Arqom Madya, dan Darul Arqom Paripurna, serta perkaderan pendukung lainnya dan juga melaksanakan diskusi-diskusi yang bersifat tatap muka seperti menyelenggarakan seminar-seminar, pelaksanaan pergantian kepemimpinan seperti MUKTAMAR, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Komisariat. Karenanya sebelum mengeluarkan kebijakan strategis organisasi yang berguna untuk mengatasi sejumlah persoalan pada organisasi tersebut, terlebih dahulu DPP melakukan kajian-kajian terhadap permasalahan dan kondisi organisasi selama masa pandemi. Kajian perencanaan kebijakan

yang disebabkan oleh pandemi covid-19, yaitu dengan melakukan agenda rapat internal organisasi yang melibatkan seluruh pengurus DPP IMM. Perencanaan ini disusun dan di diskusikan oleh pimpinan umum DPP IMM dengan bidang-bidang terkait yang ada di dalamnya seperti, bidang kaderisasi, bidang organisasi, dan lain-lain.

Kemudian dalam menetapkan perencanaan kebijakan, DPP IMM melakukan musyawarah mufakat untuk memutuskan suatu kebijakan. Seterusnya dalam mensosialisasikan kebijakan yang di ambil. DPP IMM menggelar rapat gabungan bersama DPD IMM se-Indonesia dengan menggunakan metode *online* seperti *zoom meeting* dan metode *hibryd (online dan offline)*. Dalam rangka memberikan petunjuk pelaksanaan terhadap kebijakan baru DPP IMM melalui bidang-bidangnya juga meneruskan koordinasi dengan melakukan rapat bersama bidang-bidang pada pimpinan DPD nya. Koordinasi dengan memanfaatkan media sosial ini merupakan cara DPP IMM dalam mensosialisasikan kebijakan yang sedang susun serta melakukan perencanaan kebijakan dimasa pandemi covid-19 dalam rangka menjaga setabilitas aktivitas organisasi dan mengupayakan agar tujuan organisasi tercapai meskipun masih dalam situasi pandemi covid-19.

Pengorganisian (*Organizing*)

Pada bagian pengorganisian, pertanyaan khusus yang diajukan oleh penulis adalah tentang aktivitas organisasi dan kebutuhan organisasi untuk menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan yang dibutuhkan organisasi. Selanjutnya, penelitian ini bertanya tentang kebijakan organisasi selama pandemi COVID-19 dan bagaimana tugas dan wewenang dibagi. Pengurus DPP IMM memulai perorganisian dengan mengadakan rapat diskusi tentang masalah organisasi terkait COVID-19. Kemudian, DPP IMM merumuskan tugas untuk masing-masing tingkat kepengurusan IMM, termasuk tingkat daerah, cabang, dan komisi, serta bidang terkait. Hasil wawancara dengan Ketua Bidang Organisasi AST tercantum di bawah ini:

“Sehubungan dengan kader-kader, IMM memiliki basis kampus yang jelas yaitu perguruan tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia, jadi kader-kader dapat terorganisir di DPP, DPD, Cabang, dan Komisariat. Oleh karena itu, kami di DPP harus bekerja keras untuk membuat kebijakan organisasi yang akan membantu pemulihan kader-kader ini. Selain itu, di era modern yang serba digital, kami telah menetapkan kebijakan yang memanfaatkan dunia digital dalam dua tahun terakhir. Salah satu contohnya adalah bisnis kami yang menggunakan internet untuk mengeluarkan kartu anggota. Selanjutnya, buat agenda rapat dengan Zoom Meeting dan bahkan koordinasi dengan pengurus administrasi daerah dengan lebih mudah. Hampir sepenuhnya menggunakan e-mail, yang sebelumnya biasanya dikirim melalui Pos dan Grup *WhatsApp* saja”.

Dilanjutkan A.S.T, terkait kebijakan yang dilakukan DPP IMM, bahwa “Kebijakan yang kami buat bertujuan untuk mempermudah akses administrasi organisasi dan membantu organisasi berjalan lancar dalam setiap kegiatannya ditenga kondisi pandemi, terutama selama pandemi sebelumnya. Untuk memastikan bahwa informasi tentang kebijakan ini dipahami dan dilaksanakan dengan benar, kami mengadakan pertemuan di DPP dan DPD IMM sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut, artinya telah dilakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada semua pihak yang berwenang. (Wawancara November, 2022).

Hal senada juga sebagaimana sampaikan oleh, F.S, selaku Ketua Bidang Kader DPP IMM, menyatakan sebagai berikut:

“Tidak diragukan lagi, proses kolektif kolegial atau musyawarah mufakat telah digunakan untuk menghasilkan kebijakan dan pengambilan keputusan ini. Namun, selama musyawarah dalam menentukan kebijakan, DPP IMM melakukan analisis secara mendalam terutama tentang urgensi keputusan yang berkaitan dengan masalah pandemi saat itu. Setelah penelitian tersebut dan berdasarkan fenomena yang terjadi, kami di DPP IMM baru-baru ini merumuskan solusi yang tepat mengenai masalah tersebut, yaitu regulasi serba online untuk mencegah penyebab utama COVID-19.. (Wawancara Desember, 2022).

Untuk memungkinkan koordinasi sampai pada level kepemimpinan paling rendah, kebijakan dan wewenang yang diperlukan untuk menerapkannya selama pandemi telah dikomunikasikan secara online. A.M.Y, Ketua Umum DPP IMM, menjelaskan hal ini sebagai berikut:

“Di tengah pandemi COVID-19, DPP IMM mengeluarkan beberapa kebijakan penting, terutama yang memperbolehkan melakukan pengkaderan melalui online/digital, yang sebelumnya dilakukan secara langsung. Selain itu, waktu kaderisasi, yang biasanya berlangsung lima hari, telah ditingkatkan menjadi tiga hari.. Setelah pandemi agak mereda, kami juga membuat rancangan untuk menerapkan sistem hibrid. Dalam sistem ini, pengurus DPD IMM akan berkomunikasi dengan pengurus cabang melalui rakorda (rapat koordinasi daerah), di mana DPD dan cabang berpartisipasi. Selanjutnya, media penyampai kebijakan akan melalui rakorcab (rapat koordinasi cabang), di mana para pemimpin komisariat berpartisipasi. Selanjutnya, media ini akan meneruskan komunikasi kebijakan ini ke kader akar rumput atau ke daerah-daerah”. (Wawancara November, 2022).

Pengorganisasian menentukan secara spesifik aktivitas atau kebutuhan untuk mencapai sasaran atau hasil yang akan dicapai dalam organisasi. Tahap ini merupakan suatu kegiatan untuk menyusun pelaksanaan rencana kegiatan melalui pembagian maupun pendelegasian tugas dan wewenang yang sesuai dengan kebijakan organisasi tersebut (Roesanto, 2021). Sejalan dengan apa yang disampaikan setelah merumuskan, melakukan kajian tentang perencanaan kebijakan, DPP IMM melakukan pembagian tugas dan wewenang dimana, DPP IMM melibatkan DPD IMM, Pimpinan Cabang IMM hingga pada tingkat Komisariat, dalam rangka untuk menjalankan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh DPP IMM dalam masa pandemi covid-19.

Pembagian tugas dan wewenang ini dimulai dari koordinasi Ketua Umum bersama Ketua Umum pada tingkatan DPD se-Indonesia, melalui rapat internal secara *zoom meeting* dan media *group whatsapp* terkait sosialisasi kebijakan secara umum dan meminta agar Ketua Umum masing-masing di daerahnya dapat menyebarkan kebijakan tersebut hingga ke Cabang dan Komisariat, dengan metode menyelenggarakan rapat internal serupa. Selanjutnya, bidang-bidang yang berada di masing-masing tingkatan kepemimpinan dapat melanjutkan dengan rapat internal sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk membahas secara teknis dan spesifik terkait dengan pelaksanaan kebijakan, dimulai dari DPP IMM dan DPD IMM, seperti Bidang Kader melaksanakan rapat internal, Bidang Organisasi, Bidang Hikmah melanjutkan rapat koordinasi tersebut pada bidang yang serupa pada tingkat DPD dengan cara memanfaatkan media digital seperti *zoom meeting* dan *group whatsapp*, dimana rapat internal itu membahas terkait pensosialisasian kebijakan dan tata cara pelaksanaan kebijakan. Dalam pembagian tugas dan wewenang ini, pengurus bidang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh DPP IMM agar kebijakan tersebut pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan harapan organisasi.

Pengarahan (*Directing*)

Untuk memastikan kebijakan yang dikeluarkan, DPP IMM melakukan pengarahan dan komunikasi aktif dengan pengurus diberbagai tingkatan kepemimpinan. Komunikasi aktif dan pengarahan pengurus dilakukan selama pandemi COVID-19. AMY, Ketua Umum DPP IMM, menyatakan sebagai berikut:

“Sebagai Ketua Umum, pertama-tama, saya mengumpulkan informasi dari pengurus, baik di DPP sendiri maupun di daerah-daerah, bahkan di tingkat komisariat, untuk memberikan arahan. Kemudian, saya akan menggunakan informasi ini sebagai dasar upaya saya untuk menemukan solusi. Solusi ini akan saya sampaikan juga dalam rapat gabungan bersama pengurus lainnya. Saya akan menilai jika ada yang tidak berjalan dengan baik. Singkatnya, sebagai Ketua Umum, saya terus memberikan tekanan dan pengawasan sekaligus mendorong seluruh pengurus untuk melaksanakan tugas kebijakan yang telah ditetapkan di masa pandemi ini dengan maksimal (Wawancara November, 2022).

Kembali ditambahkan oleh Ketua Umum DPP IMM juga menginstruksikan bidang-bidang terkait selama pandemi COVID-19. Semua kader dan tingkat kepemimpinan melaksanakan kebijakan dengan maksimal. Ini ditunjukkan sebagai berikut:

“Pemantauan tetap dilakukan oleh pengampu kepentingan dalam hal ini DPD IMM yang juga selalu berkoordinasi secara daring terkait pelaksanaan program-programnya kepada DPP IMM yang juga tidak jarang membantu dilapangan jika terdapat kendala-kendala yang tidak dapat diselesaikan oleh pengurus daerah.” (Wawancara November, 2022).

Selain itu, hal senada disampaikan oleh A.S.T, selaku Ketua Bidang Organisasi yang kemudian menjelaskan, sebagai berikut:

“Untuk memaksimalkan penerapan kebijakan selama pandemi COVID-19, saya percaya bahwa semua bidang harus mengikuti arahan ketua umum dan pimpinan lainnya. Semua bidang ini bertanggung jawab penuh untuk memantau kebijakan dan penerapan kebijakan yang dibuat selama pandemi. Saya berada di bidang organisasi, sehingga saya bertanggung jawab atas semua aturan administrasi organisasi. Oleh karena itu, Untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan selama pandemi COVID-19, saya memfungsikan sub strukturan yang ada dgroup sesuai bidangnya yang bertanggung jawab”. (Wawancara November, 2022).

Kembali ditambahkan oleh A.S.T, selaku Ketua Bidang Organisasi DPP IMM, bahwa untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan organisasi, DPP IMM mendorong semua pengurus dan kader untuk mempermosikan kebijakannya dan aktivitasnya di media sosial. Ini dapat dilihat dari kutipan wawancara berikut:

“Ya, setelah kebijakan yang serba digital dikeluarkan selama pandemi COVID-19, saya pikir semua kegiatan kader pasti menarik karena kami membranding gerakan tersebut di media sosial berbasis online dengan cara yang menarik dan kreatif dan penting. Selain aktivitas diskusi, IMM juga memiliki forum diskusi untuk berbagi gagasan, kritik, dan hal lainnya. Kemudian, seminar juga dilakukan; sebelum COVID-19, mereka sering dilakukan secara tatap muka, tetapi sekarang lebih banyak dilakukan secara online.. (Wawancara November, 2022).

Hal tersebut juga diperkuat oleh A.M.Y, selaku Ketua Umum, yang kemudian memberikan penjelasannya sebagai berikut:

“Pada awal pandemi COVID-19, saya pikir IMM agak terganggu dalam melakukan tugas kemasyarakatan atau kegiatan sosial, organisasi, dan sebagainya. Kami akhirnya berpikir tentang cara mendorong anggota atau kader ini untuk bersemangat saat aktivitas dibatasi selama pandemi. Jadi, kami menggunakan Instagram untuk mengikuti pola Gerakan di media online dengan menyebarkan informasi secara berkala dalam bentuk gerakan sosial kemasyarakatan, keilmuan, dan rekreasi anggota. Akhirnya, keinginan kader untuk bergerak difasilitasi.

Diteruskan A.M.Y, bahwa “Selain kegiatan perekrutan anggota, aktivitas yang paling diikuti juga adalah diskusi online dengan berbagai topik yang dibahas, dengan peserta yang beragam dari DPP hingga komisariat. seminar dan studi akademik lainnya adalah aktivitas yang sering dilakukan. Di tingkat DPP hingga DPD, kami juga terlibat dalam gerakan vaksinasi, pembagian APD, dan hal-hal lainnya, tentunya dengan protokol yang ketat. Kami menyebarkan gerakan ini di media sosial agar seluruh kader diberbagai tingkatan dapat melihatnya dan mendukung mereka untuk tetap produktif selama pandemi.”. (Wawancara November, 2022).

Pada tahapan pengarahan ini, DPP IMM melakukan koordinasi secara aktif kepada seluruh DPD IMM se-Indonesia hingga Pimpinan Cabang dan juga Komisariat, dengan cara berkomunikasi secara personal maupun melakukan komunikasi secara kelompok melalui *grup-grup whatsapp* maupun melalui rapat dengan menggunakan media *zoom meeting*. Pengarahan secara aktif dilakukan dengan menggerakkan pengurus di masing-masing bidang. Pengarahan efektif dilakukan, mengingat pada masing-masing tingkat kepengurusan dalam melaksanakan kebijakan mempunyai kemampuan yang tidak sama, dalam hal tata pelaksanaan kebijakan. Hal itu disebabkan karena kurangnya sumber daya kader yang berbeda-beda. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, DPP IMM melakukan Advokasi di masing-masing daerah dengan meminta keterangan kepada pengurus IMM di setiap daerah dan cabang terkait perkembangan pelaksanaan kebijakan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh pengurus di daerah dan cabang hingga komisariat selama melaksanakan kebijakan yang di keluarkan DPP IMM, yang nantinya lewat informasi tersebut, kemudian akan diberikan solusi yang tepat agar aktivitas organisasi bisa berjalan dan tujuan organisasi bisa tercapai.

Pengawasan (*Controlling*)

DPP IMM telah bekerja sama dengan baik dengan berbagai tingkatan kepemimpinan dan bidang-bidang terkait untuk mengawasi atau mengontrol kebijakan selama pandemi Covid-19. AMY, Ketua Umum DPP IMM, menyatakan sebagai berikut:

“Pastinya memantau secara aktif melalui bidang yang bersangkutan yang menanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan organisasi dilaksanakan dengan benar dan tujuannya tercapai. Ini dilakukan untuk memastikan koordinasi saling informasi yang efektif dan efisien dari DPP ke tingkat bawah. Alhamdulillah, kami juga memiliki banyak grup WhatsApp, yang menurut saya sangat membantu kami dalam mengelola dan berkomunikasi secara organisasi, terutama untuk memastikan bahwa kebijakan diterapkan”.

A.M.Y melanjutkan, bahwa “Bidang-bidang terkait secara khusus terlibat secara aktif dalam hal pengawasan. Misalnya, ketua bidang organisasi DPP IMM dan ketua bidang organisasi DPD se-Indonesia akan secara aktif mengawasi keputusan yang berkaitan dengan bidang organisasi. Selain itu, karena kami sudah terintegrasi dari berbagai tingkatan, bidang kader akan menggunakan seluruh perangkatnya untuk berkoordinasi dan berkomunikasi. Ini membuat komunikasi lebih efektif dan terbuka”. (Wawancara November, 2022).

Hal ini juga seperti yang disampaikan oleh F.S, selaku Ketua Bidang Kader, sebagai berikut:

“Saling berkoordinasi antara DPP dan DPD, kemudian DPD dengan cabang, dan cabang dengan komisariat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan dapat dicapai dan bahwa kebijakan yang dibuat dapat diterapkan dengan baik oleh seluruh kader di berbagai lini”. (Wawancara Desember, 2022).

Dalam pengawasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan dimasa pandemi covid-19 tersebut akan dievaluasi dan diberikan masukan jika terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Sebagaimana yang disampaikan A.S.T, selaku Ketua Bidang Organisasi, sebagai berikut:

“Jadi begini mbak, Oleh karena hal itu, ini terhubung dengan email DPD dan perbidang Whatsapp Group di DPP ini. Untuk langkah awal, kami akan memantau grup Whatsapp yang ada melalui chat dan memastikan kebijakan itu diterapkan dengan baik dan efisien. Jika ada masalah, kami akan segera mengetahuinya dan menyelesaikannya secara efektif juga. Tidak diragukan lagi, DPP IMM berkolaborasi dan berkerjasama terkait perkembangan dan tantangan pada masa pandemi covid-19. Selain itu, karena DPP IMM menggunakan sistem, semua keputusan harus diputuskan melalui musyawarah mufakat dan persetujuan dengan melibatkan bidang-bidang terkait”. (Wawancara November, 2022).

Kemudian, terkait persoalan tersebut, kembali diperkuat lebih lanjut oleh A.M.Y, selaku Ketua Umum yang dapat dilihat pada kutipan wawancara sebagai berikut:

“Evaluasi kebijakan DPP IMM biasanya dilakukan di rapat Pleno dan biasanya dilakukan satu kali sebulan. Agenda rapat pimpinan harian tergantung pada agenda yang dibuat oleh anggota organisasi. Rapat Pleno biasanya memutuskan aturan untuk evaluasi kegiatan atau kebijakan, yang dimulai dengan laporan. Misalnya, kami menemukan bahwa daerah A masih belum melaksanakan kebijakan yang telah kami keluarkan. Dimulai dengan menghubungi grup online yang sudah ada atau melalui telepon, sektor yang relevan akan mengadvokasi terlebih dahulu, DPP IMM akan mengundang pertemuan ke daerah yang bersangkutan jika ada masalah. Barulah akan diberikan penjelasan tentang alasan mengapa kebijakan yang sudah dikeluarkan tidak dapat diterapkan. Akibatnya, kami tidak hanya akan menyelesaikan masalah tersebut, tetapi juga akan membantu dalam penerapan kebijakan yang tersebar”.

“Kembali ditambah AMY. Selama pandemi Covid-19, DPP IMM menghadapi banyak tantangan yang berkaitan dengan aktivitas penting organisasi. Tantangan tersebut diantaranya, ketidakmampuan untuk merekrut anggota baru melalui kegiatan rutin organisasi IMM yaitu Darul Arqom Dasar, melakukan kegiatan pada tingkatan organisasi, yakni Darul Arqom Madya, dan Darul Arqom Paripurna serta perkaderan pendukung lainnya, seperti menyelenggarakan diskusi atau seminar dengan metode tatap muka. Selain itu, terdapat juga tantangan pada aktivitas penting organisasi IMM lainnya, yaitu pelaksanaan Musyawarah Komisariat, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Daerah,

aktivitas tersebut merupakan proses untuk pergantian kepemimpinan dalam organisasi IMM. Oleh karena itu, DPP IMM mengeluarkan kebijakan strategis organisasi dengan tujuan untuk membantu mengatasi berbagai masalah yang ada, agar aktivitas dan tujuan organisasi tercapai dengan maksimal". (Wawancara November, 2022).

Dalam tahap ini, merupakan tahap pengawasan terhadap seluruh aktivitas organisasi apakah sesuai dengan kebijakan yang dibuat DPP IMM tersebut. Apabila terjadi kendala atau penyimpangan, maka segera untuk diperbaiki dan bisa di arahkan kembali sesuai dengan rencana semula (Roesanto, 2021). Dalam melakukan pengawasan terkait pelaksanaan kebijakan, DPP IMM memberikan tugas kepada masing-masing bidang di masing-masing tingkatan kepemimpinan seperti DPD IMM, Cabang dan Komisariat. Tugas yang diberikan diantaranya, melaksanakan kebijakan, melaporkan kendala dalam pelaksanaan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan yang dijalankan oleh bidang-bidang terkait dan lain sebagainya, yang dapat dimulai dari Cabang hingga Komisariat. Misalnya, Bidang Organisasi DPP IMM mengawasi pelaksanaan kebijakan Bidang Organisasi DPD IMM, Cabang, hingga Komisariat. Ketua Umum dalam melakukan pengawasan secara keseluruhan terhadap Ketua Umum DPD IMM, Cabang dan Komisariat.

Dalam komunikasi melakukan pengawasan kebijakan di masa pandemi covid-19, DPP IMM juga menggunakan metode *online*, baik dalam melakukan rapat, penyebaran informasi termasuk dalam melakukan telpon secara personal. Dalam melakukan pengawasan DPP IMM memiliki dua jadwal rapat evaluasi dimana diselenggarakan dalam satu kali per satu minggu dan satu kali dalam datu bulan. Rapat evaluasi pertama dinamakan dengan rapat harian, dimana kendala-kendala yang diperoleh informasinya dari daerah-daerah akan di bahas bersama-sama dan mempersiapkan solusi dari masalah tersebut. Rapat kedua yaitu rapat pleno, dimana evaluasi-evaluasi dan solusi-solusi itu ditetapkan menjadi sebuah kebijakan dalam organisasi.

SIMPULAN

DPP IMM adalah organisasi dengan jumlah mahasiswa yang besar, sehingga sangat penting untuk memiliki manajemen komunikasi yang efektif, terutama selama pandemi COVID-19. Pengarahan yang akurat dan terus-menerus dari pemimpin organisasi sangat penting untuk melaksanakan kebijakan organisasi Di tengah pandemi COVID-19, semua aktivitas organisasi tidak dapat berjalan seperti biasa. Oleh karena itu, DPP IMM melakukan pengarahan dengan mengoptimalkan komunikasi secara intensif melalui media sosial seperti pertemuan Zoom, grup Whatsaap, dan melakukan komunikasi secara pribadi. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dibuat dilaksanakan dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajri Fathurrahman. (2021). Manajemen Komunikasi Yayasan Laskar Koin Seribu Melalui Program Warung Berbagi Pada Masa Pandemi Covid-19,. *Jurnal AKRAB JUARA* Volume 6 Nomor 3 Edisi Agustus 2021 (159-172)
- Amalia, L. (2020). Analisis Gejala Klinis Dan Peningkatan Kekebalan Tubuh Untuk Mencegah Penyakit Covid-19. *Jambura Journal of Health Sciences and Research*.
- Cangara, Hafid. (2013). *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada
- Creswell, John W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta : Pustaka pelajar

- Daniel. *Pengertian Manajemen Komunikasi: Metode Fungsi & Tujuan, dan komponen & Contoh Komunikasi.* (online), (<http://ekonomimanajemen.com/manajemenkomunikasi/#:~:text=Secara%20umum%2C%20tujuan%20manajemen%20komunikasi,cara%20berkomunikasi%20dengan%20pihak%20lain>), diakses pada 15 September 2022)
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan, Rain. (2020). Manajemen Komunikasi Organisasi Pada Hubungan Masyarakat dan Protokol dalam Lembaga Negara di Era Pandemi Covid-2019,. *PRecious: Public Relations Journal Volume 1 Nomor 1 - Oktober 2020*
- Handayuni, Linda. (2020). *Rekam Medis Dalam Manajemen Informasi Kegiatan*. Sumatra Barat: Penerbit Insan Cendekia Mandiri
- Handoko, T. Hani. (2014). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. BPFE, Yogyakarta. Hasibuan, Malayu S.P. 2
- Ido, Hadi Priyono. (2018). "Komunikasi dalam Suatu Organisasi". *Jurnal Komunikasi*. Vol. 4 No.1 Tahun 2018.
- KepmendikbudRI.No. 155/U/1998. *Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi*.
- Kriyantono, Rachmat. (2016). *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Kusuma Indah, Dewi. Ali, Mashar. (2019). *Nilai–Nilai Dalam Kepemimpinan Modern Pada Manajemen Kinerja*. Lampung: CV. Gre Publishing.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2015). *Komunikasi*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Lesmana Putu, Dody. Elly, Antika. (2019). *Manajemen Proyek Dengan Scrum*. Yogyakarta: CV. Absolute Media
- Moleong, Lexy J.. (2013). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offsed
- Notoadmojo, S. (2010). *Metodelogi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rikena Cipta
- Priyono. (2018). *Pengantar Manajemen*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Pujileksono. Sugeng. (2016). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Kelompok Intrans Publishing
- Sedarmayanti. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung : Rafika Aditama
- Silviani, Irene. (2020). *Komunikasi Organisasi*. Surabaya: PT.Scopindo Media Pustaka
- Siswanto. (2007). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soedarsono, Dewi, K. (2020). *Sistem Manajemen Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Sugiyono, Dewi K. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sukirman, Silvia. (2004). *Tuntunan Belajar Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Pelangi Cendikia.

Suryani, A. I. Ardiansyah. (2018). Pengaruh *Manajemen Komunikasi* Terhadap Kinerja Karyawan dengan Perilaku Kewarganegaraan sebagai Variabel Mediasi pada Karyawan PT. Witel Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen* Vol.3 No.4, 2 - 8.

Roesanto Gina Maghfira. Prasetio Arie,. (2021). Management Komunikasi pada Program Gaecep Organisasi PPKS Indonesia. *Jurna e-Proceeding of management: Vol.8*, ISSN: 2355-9357.

Yusuf, Bakri & Harnina Ridwan. (2018). "Manajemen Komunikasi Dalam Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah", *Jurnal Komunikasi*, Vol.4 No.1 tahun 2018.

PROFIL SINGKAT

Novita Srildayanti lahir di Kampung Batu Kabupaten Solok Dalam pada tanggal 09 September 1995, ia menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjana S1 (Strata Satu) di UIN Imam Bonjol Padang, dengan Kosentrasi Psikologi, Lulus Tahun 2019, dan ia kembali melanjutkan pendidikannya ke jenjang Pascasarjana Magister S2 (Starata Dua) di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan Kosentrasi Ilmu Komunikasi, Lulus Tahun 2023. Novita Serildayanti pada masa kuliah juga aktif dalam Organisasi Internal Kampus, yaktu sebagai Sekretaris Himpunan Mahasiswa Jurusan Psikologi bidang HUMAS pada Tahun 2021. Dalam karir profesional, pada Tahun 2019, Novita Srildayanti pernah menjadi Analisis Jabatan Fungsional Kementerian Koordinator Perekonomian RI. Kemudian, di Tahun 2021, pernah menjadi Staf bagian SDM Biro Psikologi POLDA SUMBAR. Saat ini, Novita Srildayanti belum bekerja pada Instansi manapun.